

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN DRAINASE DI KOTA DUMAI TAHUN 2020

Oleh: **Rafika Pratama**

Email: rafika.pratama1107@student.unri.ac.id

Pembimbing: **Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R, Soebrantas KM 12 Simp, Baru, Pekanbaru 2829

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

Drainage has become one of the most important urban infrastructure. The quality of management of a city is reflected in the quality of drainage in that city. The Office of Public Works and Spatial Planning is a government agency that is responsible for the management, development and maintenance of drainage in a city. The problem in this study is the slow construction of drainage by the Municipal Government of Dumai, as well as flooding in community areas. It is known that the construction of drainage to minimize existing flooding. This study aims to describe the performance of the Department of Public Works and Planning of the City of Dumai in constructing drainage.

This study uses performance appraisal indicators consisting of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. This type of research is descriptive qualitative in nature to describe and explain the performance of the Public Works and Spatial Planning Office in the construction of drainage in the City of Dumai. The subject of this research is the Public Works and Spatial Planning Office which is responsible for Cipta Karya. Data collection methods used in this study were interviews and documentation. Data analysis was carried out by analyzing qualitative data by summarizing, categorizing and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the performance of the Department of Public Works and Spatial Planning in the construction of drainage in Dumai City cannot be said to be good, the drainage that is built cannot function properly resulting in inundation and flooding, the drainage that is built does not meet existing standards, there is no it is clear where the direction of the existing channels and normalization of drainage must be carried out routinely.

Keywords: *Performance productivity, performance service quality, performance responsiveness*

A. PENDAHULUAN

Setiap daerah otonom memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib berupa pelayanan dasar yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Salah satunya ialah pembangunan drainase diketahui bersama drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Saat ini drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat penting. Kualitas manajemen suatu kota tercermin dari kualitas drainase di kota tersebut. Di Kota Dumai sendiri ada berbagai permasalahan mengenai ini diantaranya masih seringnya terjadi banjir. Dimensi saluran lingkungan banyak yang tidak standar (terlalu kecil) dan sebagian lainnya tersumbat oleh sampah dan tanaman sehingga air menghitam dan menimbulkan bau. Sebagian besar jaringan drainase lingkungan belum terkoneksi jaringan sekunder kota. Pembangunan saluran sekunder kota kurang memperhatikan elevasi dan arah aliran air sehingga masih terjadi genangan baik di saluran sekunder kota maupun saluran drainase lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan

Sistem Drainase Perkotaan pasal 4 ayat 3 berbunyi: “Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya”. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase. Tupoksi tersebut dilaksanakan oleh salah satu bidang yakni Bidang Cipta Karya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Dumai.

Pembangunan drainase dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada. Pendanaan program pembangunan drainase/gorong-gorong berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai. Penggunaan dana APBD yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan drainase akan disesuaikan dengan skala prioritas. Penggunaan pendanaan pembangunan dilakukan secara optimal dengan menggunakan kaidah-kaidah sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendanaan pembangunan yaitu dengan fokus meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas melalui proyek prioritas dan integrasi pendanaan yang dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: mengutamakan alokasi pada prioritas, mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas daerah.

Pendanaan pembangunan diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan

nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana APBD untuk pembangunan drainase tidak dapat dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada urgensi drainase pada wilayah tertentu. Urgensi yang dimaksud misalnya seperti separah apa kerusakan yang terjadi pada drainase dan sesuai dengan fungsi drainase yang akan mempengaruhi intensitas kegiatan masyarakat.

Pendanaan terutama berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan pemerintah dan rendahnya alokasi APBD yang merupakan akibat dari rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan drainase baik dari segi pembangunan maupun biaya operasi dan pemeliharaan drainase di Kota Dumai.

Tabel Pembangunan drainase di Jalan Bintang 2020

Nama Jalan	Tahun	Anggaran	Panjang Drainase (meter)
Jalan Bintang	2020	1.528.000,69	1000

Sehubungan dengan penelitian ini, ditemukan fenomena pada drainase di Jalan Bintang Kota Dumai:

1. Drainase yang dibangun di Jalan Bintang tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik.
2. Masih seringnya terjadi banjir di Kota Dumai yang disebabkan oleh air hujan dan pasang surut air laut, lebih tepatnya di Jalan Bintang setelah dilakukannya pembangunan drainase pada tahun 2020 masih sering terjadi banjir.

3. Drainase yang dibangun tidak memiliki saluran jaringan yang jelas.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan drainase di Kota Dumai tahun 2020?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan drainase di Kota Dumai tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian – kajian yang mengarah pada pengembangan Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah Kota Dumai terhadap pembangunan dan pemeliharaan Drainase.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fawahid dengan judul “Manajemen Perkotaan (Studi kasus Penataan drainase di Kota Pekanbaru)”, JOM FISIP, 3 (2), Oktober 2016
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansah dkk, dengan judul “Pelaksanaan pemabngunan drainase

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan” Jurnal Dinamika Madani, 1(1), Desember 2018.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Hermiyati Eka Putri dengan judul “Responsivitas Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam penanganan permasalahan prasarana drainase di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta”. *JI@P*, 10(1) 2021.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Hermiyati Eka Putri dengan judul “Responsivitas Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam penanganan permasalahan prasarana drainase di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta”. *JI@P*, 10(1) 2021.
- e. penelitian yang dilakukan oleh Jihan Hanipa Ritonga dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang”, *JIMSIPOL*, 1 (4), Desember 2021.

2. Kerangka Teori

a. Kinerja

Kinerja (performance) sudah menjadi kata yang sangat menarik dalam pembicaraan publik. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai(per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja juga bisa dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input).

Mengukur kinerja organisasi publik cukuplah sulit karena bersifat multidimensional karena stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto indikator-indikator kinerja organisasi publik adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responibilitas, akuntabilitas.

b. Pembangunan

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top-down, tetapi tergantung dengan innerwill, proses emansipasi diri. Dengan demikian partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pendewasaan. Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil makmur.

Dalam hal infrastruktur, pembangunan dan perbaikan infrastruktur sangat mutlak diperlukan untuk mendukung berkembangnya

roda perekonomian. Setiap hal yang ingin dibangun seperti jalan, jembatan, drainase dan lainnya harus 18 mempertimbangkan efek yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

E. METODE PENELITIAN

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diseleksi dengan menjelaskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada.

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, terkhusus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan Drainase di Kota Dumai tahun 2020.

Di setiap kinerja pemerintahan, baik pemerintah pusat atau daerah, jika ingin mencapai hasil kerja yang maksimal, setiap organisasi atau pemerintahan harus berusaha

memenuhi tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sambil menjamin keberlanjutan jangka panjang. Artinya kinerja organisasi tercapai apabila tugas atau pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien dan tetap relevan dengan keinginan semua pemangku jabatan (stakeholder).

Di sini ditekankan komponen utama kinerja organisasi atau pemerintahan yakni pemahaman pencapaian tujuan yang sesuai target (efektif) dan menggunakan sumber daya yang relatif sedikit (efisien) sebagai perilaku manajemen operasional. Kemudian sebagaimana yang telah penulis jelaskan di awal pembahasan pada dasarnya suatu kebijakan pasti ada hubungannya dengan kinerja pemerintah, dan suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Berkaitan dengan tata ruang, maka satu hal yang perlu dipahami adalah tata ruang pada dasarnya tidak mengatur tentang kepemilikan ruang (lebih mudah dikenal sehari-hari dengan ungkapan lahan), akan tetapi tata ruang lebih mengatur pada penggunaan ruang tersebut, baik pada permukaan, dibawah maupun diatasnya. Agar terwujudnya keharmonisan pada lingkungan salah satunya perlu ada dilakukan pembangunan drainase, dimana saat ini drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan, kualitas manajemen suatu kota dapat dilihat dari kualitas drainase yang ada di kota tersebut.

Sistem drainase yang baik dapat membebaskan suatu kota dari genangan air, genangan air ini dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan jorok, menjadi

sarang nyamuk dan sumber penyakit lainnya, sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di kota tersebut.

a. Produktivitas

Kota Dumai setiap tahun pasti ada dilakukan pembangunan drainase dan pemeliharaan drainase, baik itu normalisasi sungai, pembersihan drainase dan bahkan sampai dilakukannya pengerukan dan pelebaran sungai untuk meminimalisir banjir yang sering terjadi banjir di Kota Dumai.

Tetapi upaya yang dilakukan pemerintah Kota Dumai dalam mengatasi banjir yang ada belum membuahkan hasil yang positif, dimana masih seringnya terjadi banjir di Kota Dumai, bahkan dalam waktu satu bulan hampir setiap minggunya terjadi banjir, baik banjir yang disebabkan oleh air hujan ataupun pasang surut air laut. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, bahwasannya:

“Setiap tahunnya di Kota Dumai ini memang ada dilakukannya pembangunan drainase dan kita juga rutin melakukan pemeliharaan drainase yang ada, baik dari melakukan pembersihan drainase dan juga melakukan perbaikan drainase yang rusak”(wawancara 27 Juli 2022).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Dumai dapat penulis simpulkan bahwasannya di Kota Dumai setiap tahunnya selalu ada dilakukannya pembangunan drainase, setiap drainase yang sudah ada di Kota Dumai ini pasti diharapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, Pemerintah Kota Dumai juga rutin melakukan normalisasi

saluran agar saluran yang ada dapat mengalirkan air dengan baik. Di Kota Dumai masih ada terdapat wilayah yang belum memiliki drainase.

Kemudian pada pembangunan drainase pada tahun 2020, pemerintah Kota Dumai membangun drainase di Jalan Bintang dengan anggaran 1,5 miliar, panjang drainase yang dibangun di Jalan Bintang ini adalah 1000 meter dengan waktu pengerjaan 50 hari kalender. Drainase dibangun dengan tujuan dapat meminimalisir banjir yang terjadi di Kota Dumai baik itu disebabkan oleh air hujan maupun pasang surut air laut, dengan adanya drainase maka akan membantu perekonomian masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan drainase dilakukan dengan memanfaatkan pendanaan yang ada, anggaran pembangunan drainase berasal dari APBD.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan ini dapat dilihat dari kepuasan masyarakat, kualitas yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik pula, namun sebaliknya apabila kepuasan masyarakat tidak terpenuhi maka kinerja pemerintah dapat dikatakan kurang baik. Kualitas layanan pembangunan drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai di Jalan Bintang pada tahun 2020, pembangunan drainase ini menggunakan anggaran kurang lebih 1,5 miliar dengan panjang saluran drainase yang dibangun yaitu 1000 meter dan waktu pengerjaan 50 hari kalender, pembangunan drainase yang dibangun ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang sering terjadi.

Pembangunan drainase yang dilakukan

di Kota Dumai adalah untuk mengantisipasi banjir yang terjadi, maka dari itu dibangunlah drainase di Jalan Bintan, pembangunan drainase di Jalan Bintan ini dikerjakan oleh CV Gatra Consultant sesuai dengan prosedur yang ada, seperti halnya yang disampaikan oleh Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, bahwasannya:

“Setiap pembangunan drainase yang kita lakukan pasti sudah kita rencanakan dan kita siapkan dengan baik, bukan hanya untuk pembangunan drainase saja, semua pembangunan apasaja di Kota Dumai pasti kita persiapkan dengan matang, dan mengenai bahan baku yang kita gunakan pasti kita pilih bahan baku yang mempunyai kualitas terbaik, dan kita juga selalu bekerja sama dengan pihak ketiga yang terbaik juga supaya hasil yang diinginkan memuaskan kita semua, dan itu kita upayakan dari anggaran kita yang terbatas itu”(wawancara 27 Juli 2022).

Jalan Bintan adalah salah satu jalan yang ada di Kota Dumai yang sering terjadi banjir, dilakukannya pembangunan drainase di jalan tersebut adalah untuk meminimalisir banjir yang terjadi di jalan tersebut, banjir di jalan tersebut bukan hanya disebabkan oleh pasang surut air laut namun juga disebabkan oleh air hujan.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kota Dumai terbuka untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan aspirasinya.

Pada pembangunan drainase di Jalan Bintan Kota Dumai tahun 2020, masyarakat mengeluhkan banjir yang terjadi di jalan tersebut setelah dilakukannya proyek pembangunan drainase, pihak Dinas PUPR langsung merespon keluhan masyarakat tersebut, meskipun respon yang disampaikan tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam hal drainase banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kesahnya, yaitu drainase yang ada tidak berfungsi dengan baik, banyak drainase yang terdapat sampah dan lumpur, kemudian banyak masyarakat yang meminta untuk dibangun drainase di wilayah mereka yang sering terjadi banjir ketika hujan turun, seperti yang disampaikan oleh Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Dumai, bahwasannya:

“Dalam melakukan pembangunan drainase, kita terlebih dahulu mengkaji dan merencanakan serta menyesuaikan dengan anggaran yang ada, permintaan untuk dilakukannya pembangunan drainase dari masyarakat itu sangat banyak tetapi dengan anggaran yang terbatas ini kita melihat dari prioritas yang ada”(wawancara 27 Juli 2022).

Permintaan untuk dilakukannya pembangunan drainase tidak sebanding dengan anggaran yang ada, anggaran merupakan hal yang sangat penting ketika suatu individu ataupun kelompok ingin menjalankan suatu program, dengan anggaran semuanya akan berjalan dengan lancar dan susahnyaa anggaran juga akan membuat semua program tidak akan berjalan dengan lancar.

Beberapa keluhan yang disampaikan

masyarakat adalah berkaitan dengan waktu penyelesaian proyek pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan, drainase yang dibangun banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini justru menimbulkan masalah yang sering terjadi di Kota Dumai ini, sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pembangunan drainase yang dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya banjir yang di Kota Dumai, namun pada kenyataannya drainase yang dibangun justru tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan, sebagai contoh adalah pembangunan drainase yang dilakukan di Jalan Bintang Kota Dumai yang masih sering terjadi genangan dan banjir, ini tidak sesuai dengan fungsi dari drainase itu sendiri dan respon dari pemerintah dalam menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

d. Responibilitas

Responibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip adminisitrasi yang benar. Pada pembangunan drainase ada beberapa syarat yang bisa dipenuhi agar drainase yang dibangun itu berfungsi dengan baik, yaitu ukuran saluran drainase mencukupi dikarenakan sistem drainase yang baik dan efektif harus memiliki saluran dengan ukuran yang memadai sehingga saluran tersebut dapat secara optimal mengalirkan dengan baik, selanjutnya kemiringan saluran juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kinerja saluran drainase, selanjutnya drainase yang baik adalah yang tidak merembes, kemudian memberikan kemudahan dalam pemeliharannya.

Pembangunan drainase di Jalan Bintang Kota Dumai tahun 2020, pada tahap

pelaksanaan seperti yang dikatakan oleh Kabid Cipta Karya yaitu ditemukannya masalah pada pembangunan drainase tetapi bisa teratasi, masalah yang ditemukan tidak menghambat pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan drainase di Jalan Bintang Kota Dumai dan Pemerintah Kota Dumai juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan drainase yang dilakukan di Jalan Bintang ini tahun 2020 ini berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan drainase ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat serta berguna untuk mengantisipasi banjir.

Setelah pekerjaan pembangunan drainase di Jalan Bintang ini selesai, jalan tersebut kembali terjadi banjir yang disebabkan oleh air hujan, masyarakat di Jalan bintang tersebut mengeluh jalan tersebut terjadi banjir setelah dilakukannya proyek pembangunan drainase oleh Dinas PUPR Kota Dumai, Dinas PUPR mengatakan tidak ada kesalahan dalam proyek pembangunan drainase dan memang jalan tersebut sering terjadi banjir.

Ini membuktikan bahwa drainase yang dibangun di Jalan Bintang tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada, drainase yang dibangun seharusnya dapat menampung debit air dan mengalirkan air sehingga tidak merembes atau menjadi genangan di jalanan, tampaknya di Kota Dumai perlu dilakukannya normalisasi drainase besar-besaran sehingga air yang ada di drainase dapat berfungsi dengan baik, setiap drainase yang dibangun harus memiliki hubungan dengan saluran yang lain.

e. Akuntabilitas

Sesuai Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam hal ini akuntabilitas Pemerintah Kota Dumai terhadap kinerja pembangunan drainase di Kota Dumai tahun 2020.

Pada saat ini pembangunan drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai belum bisa dikatakan memenuhi aspirasi masyarakat, alasan di banggunya drainase yaitu untuk mengatasi permasalahan banjir, namun drainase yang dibangun belum memenuhi standar yang ada, fungsi drainase yang seharusnya menampung dan mengalirkan air yang ada di saluran tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi genangan di jalanan. Pemerintah Kota Dumai telah banyak melakukan upaya untuk pencegahan banjir yang terjadi, namun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai belum membuahkan hasil yang positif. Masyarakat sudah mengeluhkan mengenai permasalahan banjir yang terjadi ini, seperti pernyataan pernyataan dari yanti (36) masyarakat Kota Dumai mengatakan bahwasannya:

“Untuk di jalan bintang banjir nya tidak terlalu tinggi, tapi ketika kita mau keluar ke jalan sultan syarif kasim, kita lihat aja lah ni ujung nya jalan bintang yang disebalah sinikan jalan sultan syarif kasim, nah jalan itu banjir nya tinggi sampai setinggi trotoar, apalagi kalau banjir air pasang terus ditambah dengan hujan yang cukup lama, itu sudah pasti banjir, kita mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan

masalah banjir yang tidak ada habis nya ini” (Wawancara 30 Juli 2022).

11 Kinerja pemerintah Kota Dumai dalam hal drainase dan menangani banjir itu masih kurang, diharapkan dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan di Kota Dumai ini, pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerja sama dengan sebaik mungkin. Seperti halnya dengan drainase yang dibangun harus direncanakan dengan baik serta waktu penyelesaian pengerjaan drainase harus sesuai dengan yang ditetapkan agar tidak terganggunya aktivitas masyarakat.

Dengan anggaran yang ada pemerintah harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin, Pemerintah Kota Dumai harus dapat merencanakan sebuah program pembangunan drainase yang baik agar pada tahap pelaksanaan tidak ditemukannya permasalahan sehingga penyelesaian pembangunan drainase tersebut tepat waktu, lambatnya penyelesaian pembangunan drainase dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dimana hal itu tidak sejalan dengan tujuan dilakukannya pembangunan drainase, drainase yang berfungsi dengan dengan baik dapat mempermudah aktivitas masyarakat dan membantu roda perekonomian.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan drainase di Kota Dumai tahun 2020, maka diperoleh kesimpulan:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan drainase di

Kota Dumai tahun 2020, jauh dari kata cukup, pembangunan drainase yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan, yaitu drainase yang dibangun tidak berfungsi dengan baik sehingga banjir masih sering terjadi, saluran drainase yang dibangun tidak memenuhi standar.

2. Dalam melakukan pembangunan drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai terlebih dahulu melakukan perencanaan agar drainase yang dibangun dapat berfungsi dengan baik, tetapi setelah drainase dibangun tetap ditemukannya masalah yang sama, drainase di Jalan Bintan yang dibangun pada tahun 2020 jika hujan turun jalan tersebut selalu menjadi langganan banjir. Ini membuktikan bahwa drainase yang dibangun untuk meminimalisir banjir yang ada di Kota Dumai belum berjalan dengan baik.
3. Pemerintah Kota Dumai harus dapat meningkatkan produktivitas pembangunan drainase, dikarenakan masih banyaknya jalanan yang belum memiliki drainase secara fisik.

b. Sarana

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai harusnya berbenah kemudian melakukan program-program dengan sebaik mungkin dan menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan atau pembangunan drainase di Kota Dumai ini agar berjalan dengan optimal maka harus dilakukannya pemeliharaan secara baik terhadap saluran

drainase yang sudah ada, dengan tujuan agar drainase tersebut dapat menampung debit air dan salurannya menjadi lancar.

3. Kemudian di butuhkan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase, agar masyarakat tidak ada lagi yang beranggapan bahwa drainase ini adalah tanggung jawab pemerintah saja, dimana sosialisasi ini bisa dilakukan melalui Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Dumai agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Kota Dumai. Selanjutnya SDM yang paham dengan hal drainase ini harus dapat ditingkatkan, supaya permasalahan drainase di Kota Dumai ini dapat teratasi.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Adamy, Marbawi. (2016). *Manajemen sumberdaya manusia*. Unimal Press.
- Bungin, Burhan. (2006). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Digdowiseiso, Kumba. (2019). *Teori Pembangunan*. LPU-UNAS.
- Dwiyanto, Agus. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Labolo, Muhadam. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahi, A. K., & Trigunarjo. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: KENCANA
- Muhammad. (2018). *Birokrasi (Kajian konsep, Teori menuju Good Governance)*. Unimal Press..
- Rusfiana, Y., & Suprianta, C. (2021) *Memahami birokrasi pemerintahan dan perkembangannya*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*

kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryani, Ni Kadek. (2018). *Kinerja organisasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama. .

Tsauri, Sofyan. (2014). *Manajemen kinerja (performance management)*. Jember: STAIN Press.

Wiyono, Untung. (2006). *Meletakkan Pondasi Pembangunan Daerah*. Sragen: Perusda Percetakan dan Penerbitan.

Sumber Lainnya

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sistem, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Dumai.

Jurnal

Amalia, H. Evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12.(1), 19-26.

Ardiansah, A., Kadaryanto, B., & Rani, N. P. (2018). Pelaksanaan pembangunan drainase Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

Perkotaan. *Dinamika Madani-Jurnal Pembangunan Daerah dan Inovasi*, 1(1), 49-62.

Fawahid, A. (2016). Manajemen perkotaan (studi kasus penataan drainase di Kota Pekanbaru). *JOM FISIP*, 3(2).

Lubis, E. S. (2022). Efektivitas pelaksanaan pemeliharaan tata kelola air dan drainase di dinas pekerjaan umum Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 2(1).

Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2).

Putri, A. H. E. (2021). Responsivitas pelayanan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Surakarta dalam penanganan permasalahan prasarana drainase di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. *Jl@P*, 10(1).

Ritonga, J. H. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase di Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4).

Nurmadimah, F. (2012). *Analisis pemilihan proyek pengembangan bandara UPT dengan skema KPS*. Tesis, Universitas Indonesia.